



LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 10 Ayat 3, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya yang disusun secara akuntabel dan transparan.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Muara Sabak, 2024
Kepala,



Herman Loni, S.E, M.E
NIP. 19780420 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
LAPORAN KEUANGAN	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
NERACA.....	4
LAPORAN OPERASIONAL	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	13
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	14
BAB I PENDAHULUAN.....	14
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	20
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	28
BAB VI PENUTUP.....	43

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muara Sabak, 29 Desember 2023

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Herman Toni, S.E., M.E.
NIP. 19780420200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 DAN 2022

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1					PENDAPATAN	333.000.000,00	292.377.800,00	87,80	319.433.400,00
1	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	333.000.000,00	292.377.800,00	87,80	319.433.400,00
1	1	02			RETRIBUSI DAERAH	333.000.000,00	292.377.800,00	87,80	319.433.400,00
1	1	02	01		Retribusi Jasa Umum	333.000.000,00	292.377.800,00	87,80	319.433.400,00
1	1	02	01	13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	333.000.000,00	292.377.800,00	87,80	319.433.400,00
1	1	02	01	13 0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	333.000.000,00	292.377.800,00	87,80	319.433.400,00
2					BELANJA DAERAH	6.557.124.570,00	6.419.072.144,70	97,89	7.196.693.815,00
2	1				BELANJA OPERASI	6.194.558.486,00	6.059.637.144,70	97,82	6.180.440.815,00
2	1	01			BELANJA PEGAWAI	2.159.881.179,00	2.092.033.419,70	96,86	2.097.338.227,00
2	1	01	01		BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.264.351.499,00	1.262.211.488,00	99,83	1.231.410.907,00
2	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	894.342.748,00	892.525.600,00	99,80	870.751.280,00
2	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	94.266.084,00	94.186.432,00	99,92	89.886.140,00
2	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.350.000,00	126.350.000,00	100,00	126.350.000,00
2	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.965.000,00	17.965.000,00	100,00	17.920.000,00
2	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.618.560,00	55.546.140,00	99,87	54.315.000,00
2	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	3.549.116,00	3.549.116,00	100,00	1.928.980,00
2	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.192,00	11.808,00	96,85	11.609,00
2	1	01	01	09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	64.896.655,00	64.726.248,00	99,74	63.068.301,00
2	1	01	01	10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.837.768,00	1.837.768,00	100,00	1.794.877,00
2	1	01	01	11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.513.376,00	5.513.376,00	100,00	5.384.720,00
2	1	01	02		BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	688.149.680,00	659.591.931,70	95,85	657.277.320,00
2	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	275.708.680,00	252.852.165,70	91,71	657.277.320,00
2	1	01	02	05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	412.441.000,00	406.739.766,00	98,62	0,00
2	1	01	03		TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	207.380.000,00	170.230.000,00	82,09	208.650.000,00
2	1	01	03	02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	14.250.000,00
2	1	01	03	07	Belanja Honorarium	176.880.000,00	150.980.000,00	85,36	179.400.000,00
2	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.000.000,00	3.750.000,00	25,00	15.000.000,00
2	1	02			BELANJA BARANG/JASA	4.034.677.307,00	3.967.603.725,00	98,34	4.083.102.588,00
2	1	02	01		Belanja Barang	474.247.307,00	464.884.361,00	98,03	341.371.200,00
2	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	474.247.307,00	464.884.361,00	98,03	341.371.200,00
2	1	02	01	01 02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	1	02	01	01 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.052.158,00	25.052.000,00	100,00	12.842.900,00
2	1	02	01	01 12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	0,00
2	1	02	01	01 23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	50.000.000,00	49.944.000,00	99,89	0,00
2	1	02	01	01 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	35.397.773,00	34.840.188,00	98,42	43.384.650,00
2	1	02	01	01 25	Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	14.518.400,00
2	1	02	01	01 26	Belanja Alat untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	291.504.222,00	288.534.173,00	98,98	107.385.400,00
2	1	02	01	01 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00	2.000.000,00
2	1	02	01	01 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.570.000,00	6.445.000,00	98,10	17.500.000,00
2	1	02	01	01 30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.883.954,00	15.224.900,00	95,85	28.668.150,00
2	1	02	01	01 31	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.464.200,00	4.460.600,00	99,92	3.574.200,00
2	1	02	01	01 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.400.000,00	2.360.000,00	98,33	51.617.500,00
2	1	02	01	01 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.805.000,00	10.303.500,00	69,59	19.260.000,00

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2	1	02	01	01	54	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	10.020.000,00
2	1	02	01	01	63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.950.000,00	22.500.000,00	98,04	29.400.000,00
2	1	02	02			Belanja Jasa	2.831.990.000,00	2.802.101.279,00	98,94	3.160.576.550,00
2	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	2.711.010.000,00	2.687.141.279,00	99,12	3.103.816.550,00
2	1	02	02	01	03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4.200.000,00	2.650.000,00	63,10	0,00
2	1	02	02	01	26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	203.350.000,00	203.350.000,00	100,00	194.700.000,00
2	1	02	02	01	30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	28.600.000,00	28.600.000,00	100,00	26.400.000,00
2	1	02	02	01	31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	26.400.000,00
2	1	02	02	01	39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	291.500.000,00	291.500.000,00	100,00	286.500.000,00
2	1	02	02	01	55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, film dan Pemotretan	856.400.000,00	854.100.900,00	99,73	915.600.000,00
2	1	02	02	01	59	Belanja Tagihan Telpn	75.600.000,00	66.870.350,00	88,45	0,00
2	1	02	02	01	61	Belanja Tagihan Listrik	110.000.000,00	105.619.549,00	96,02	95.548.400,00
2	1	02	02	01	62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	495.600.000,00
2	1	02	02	01	63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.096.460.000,00	1.091.787.293,00	99,57	1.054.200.000,00
2	1	02	02	01	67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.700.000,00	5.463.187,00	70,95	8.868.150,00
2	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	105.980.000,00	104.960.000,00	99,04	36.760.000,00
2	1	02	02	04	35	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.780.000,00	14.780.000,00	100,00	29.560.000,00
2	1	02	02	04	36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	87.600.000,00	86.580.000,00	98,84	0,00
2	1	02	02	04	49	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	7.200.000,00
2	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatih, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	20.000.000,00
2	1	02	02	12	01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	20.000.000,00
2	1	02	03			BELANJA PEMELIHARAAN	237.940.000,00	229.477.440,00	96,44	191.786.900,00
2	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.700.000,00	137.190.290,00	97,51	127.936.300,00
2	1	02	03	02	22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.123.290,00	99,07	0,00
2	1	02	03	02	35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	73.370.000,00	73.370.000,00	100,00	73.370.000,00
2	1	02	03	02	38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda dua	19.050.000,00	19.050.000,00	100,00	19.050.000,00
2	1	02	03	02	117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.724.300,00
2	1	02	03	02	120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00
2	1	02	03	02	121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.060.000,00	99,34	7.320.000,00
2	1	02	03	02	123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2	1	02	03	02	133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
2	1	02	03	02	404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
2	1	02	03	02	405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	3.087.000,00	60,41	19.092.000,00
2	1	02	03	02	409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
2	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.240.000,00	49.770.500,00	95,27	44.351.000,00
2	1	02	03	03	01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.240.000,00	9.866.000,00	80,60	14.415.000,00
2	1	02	03	03	37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.936.000,00
2	1	02	03	03	57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	40.000.000,00	39.904.500,00	99,76	0,00
2	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000,00	42.516.650,00	94,48	19.499.600,00
2	1	02	03	04	118	Belanja Pemeliharaan Instalansi-Instalansi Lain-Instalansi Lain	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2	1	02	03	04	127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telpn- Jaring Telpn di atas Tanah	0,00	0,00	0,00	17.999.600,00
2	1	02	03	04	131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya	45.000.000,00	42.516.650,00	94,48	0,00
2	1	02	04			BELANJA PERJALANAN DINAS	490.500.000,00	471.140.645,00	96,05	389.367.938,00
2	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri	490.500.000,00	471.140.645,00	96,05	389.367.938,00
2	1	02	04	01	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	372.500.000,00	368.554.175,00	98,94	273.612.378,00
2	1	02	04	01	03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	118.000.000,00	102.586.470,00	86,94	115.755.560,00

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2	2					BELANJA MODAL	362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00
2	2	02				BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00
2	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan	20.000.000,00	17.400.000,00	87,00	0,00
2	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	17.400.000,00	87,00	0,00
2	2	02	02	01	04	Belanja Modal Alat Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	17.400.000,00	87,00	0,00
2	2	02	5			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.235.000,00	68.085.000,00	99,78	0,00
2	2	02	5	01		Belanja Modal Alat Kantor	64.235.000,00	64.235.000,00	100,00	0,00
2	2	02	5	01	05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	64.235.000,00	64.235.000,00	100,00	0,00
2	2	02	5	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	3.850.000,00	96,25	0,00
2	2	02	5	02	01	Belanja Modal Mebel	2.500.000,00	2.450.000,00	98,00	0,00
2	2	02	5	02	06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.400.000,00	93,33	0,00
2	2	02	6			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	50.132.384,00	50.000.000,00	99,74	698.000.000,00
2	2	02	6	01		Belanja Modal Alat Studio	50.132.384,00	50.000.000,00	99,74	311.100.000,00
2	2	02	6	01	01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	21.439.884,00	21.400.000,00	99,81	0,00
2	2	02	6	01	02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.692.500,00	28.600.000,00	99,68	311.100.000,00
2	2	02	6	02		Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	386.900.000,00
2	2	02	6	02	06	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	386.900.000,00
2	2	02	10			Belanja Modal Komputer	224.198.700,00	223.950.000,00	99,89	318.253.000,00
2	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	193.698.700,00	193.450.000,00	99,87	305.853.000,00
2	2	02	10	01	01	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	125.975.000,00
2	2	02	10	01	02	Belanja Modal Personal Computer	193.698.700,00	193.450.000,00	99,87	179.878.000,00
2	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	12.400.000,00
2	2	02	10	02	03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	12.400.000,00
						SURPLUS/(DEFISIT)	(6.224.124.570,00)	(6.126.694.344,70)	98,43	(6.877.260.415,00)

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
N E R A C A

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	NILAI PERTANGGAL	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	2	3
ASET	2.626.290.184,11	2.745.711.220,31
ASET LANCAR	26.661.238,08	4.433.954,16
Piutang Retribusi Daerah	44.358.600,00	0
Piutang Retribusi Jasa Umum	44.358.600,00	0
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	44.358.600,00	0
Piutang Retribusi	(22.179.300,00)	0
Penyisihan Piutang Pendapatan	(22.179.300,00)	0
Penyisihan Piutang Retribusi	(22.179.300,00)	0
Beban Dibayar Dimuka	3.497.938,08	3.601.154,16
Beban Dibayar Dimuka	3.497.938,08	3.601.154,16
Beban Dibayar Dimuka	3.497.938,08	3.601.154,16
Persediaan	984.000,00	832.800,00
Barang Pakai Habis	984.000,00	832.800,00
Alat Tulis Kantor	620.000,00	734.200,00
Bahan Cetak	303.000,00	70.500,00
Perabot Kantor	61.000,00	28.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	26.661.238,08	4.433.954,16
ASET TETAP	2.599.628.946,03	2.741.277.266,15
Peralatan dan Mesin	5.463.350.712,00	5.103.915.712,00
Alat Besar	199.788.000,00	167.100.000,00
Electric Generating Set	188.100.000,00	167.100.000,00
Pompa	11.688.000,00	0
Alat Angkutan	646.117.400,00	628.717.400,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	496.200.000,00	496.200.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	149.917.400,00	132.517.400,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.697.000,00	4.697.000,00
Alat Ukur Universal	4.697.000,00	4.697.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.246.682.100,00	1.271.351.400,00
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	54.884.000,00	87.734.000,00
Alat Kantor Lainnya	128.550.000,00	849.304.150,00
Mebel	140.490.000,00	126.340.000,00
Alat Pembersih	1.700.000,00	0
Alat Pendingin	118.966.450,00	106.977.500,00
Alat Dapur	3.947.750,00	2.097.750,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	721.693.900,00	73.898.000,00
Alat Pemadam Kebakaran	5.100.000,00	0
Meja Kerja Pejabat	0	10.000.000,00

URAIAN	NILAI PERTANGGAL	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	2	3
Kursi Kerja Pejabat	14.850.000,00	5.000.000,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	10.000.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	56.500.000,00	0
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.122.813.000,00	1.483.400.000,00
Peralatan Studio Audio	21.400.000,00	0
Peralatan Studio Video dan Film	421.885.000,00	704.820.000,00
Alat Komunikasi Telephone	477.125.000,00	44.880.000,00
Alat Komunikasi Radio SSB	22.800.000,00	22.800.000,00
Alat Komunikasi Radio VHF	0	87.725.000,00
Alat Komunikasi Sosial	0	386.900.000,00
Peralatan Antena UHF	44.880.000,00	0
Switcher/Menara Antena	134.723.000,00	134.723.000,00
Humidity Control	0	101.552.000,00
Komputer	2.243.253.212,00	1.548.649.912,00
Komputer Jaringan	0	125.975.000,00
Personal Computer	868.320.000,00	508.749.000,00
Peralatan Mini Computer	0	4.521.000,00
Peralatan Personal Computer	90.536.000,00	48.036.000,00
Peralatan Jaringan	1.082.982.800,00	861.368.912,00
Peralatan Komputer Lainnya	201.414.412,00	0
Gedung dan Bangunan	1.503.383.935,15	1.503.383.935,15
Bangunan Gedung	1.254.301.735,15	1.254.301.735,15
Bangunan Gedung Kantor	920.932.000,00	920.932.000,00
Bangunan Gudang	18.000.000,00	18.000.000,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	131.527.827,73	131.527.827,73
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	166.337.822,27	166.337.822,27
Rumah Negara Golongan II	17.504.085,15	17.504.085,15
Monumen	0	64.669.000,00
Tugu	0	47.741.000,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0	16.928.000,00
Bangunan Menara	201.341.200,00	184.413.200,00
Bangunan Menara Telekomunikasi	184.413.200,00	184.413.200,00
Bangunan Menara Perambuan Lainnya	16.928.000,00	0
Tugu Titik Kontrol/Pasti	47.741.000,00	0
Tugu/Tanda Batas Administrasi	47.741.000,00	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.283.000,00	118.283.000,00
Instalasi	118.283.000,00	118.283.000,00
Instalasi Gardu Listrik Distribusi	118.283.000,00	0
Instalasi Pengamanan Penangkal Petir	0	118.283.000,00
Akumulasi Penyusutan	(4.485.388.701,12)	(3.984.305.381,00)

URAIAN	NILAI PERTANGGAL	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.872.767.412,00)	(3.408.695.212,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(188.100.000,00)	(167.100.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(10.138.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(496.200.000,00)	(496.200.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(132.517.400,00)	(114.806.400,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(4.697.000,00)	(4.697.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	(54.884.000,00)	(81.484.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(64.315.000,00)	(848.066.650,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(138.040.000,00)	(126.340.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1.700.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(117.716.450,00)	(104.477.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(3.947.750,00)	(2.097.750,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(500.309.100,00)	(61.023.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(5.100.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0	(8.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(14.850.000,00)	(4.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	(8.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(54.375.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(191.858.000,00)	(198.941.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(132.515.000,00)	(44.880.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(22.800.000,00)	(22.800.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0	(35.090.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pemancar-Peralatan Antena UHF	(44.880.000,00)	0
Akumulasi Penyusutan Alat Pemancar-Switcher/Menara Antena	(67.361.500,00)	(53.889.200,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pemancar-Humidity Control	0	(50.776.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(475.238.400,00)	(225.666.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0	(2.712.600,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(44.603.200,00)	(24.330.400,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(905.207.200,00)	(723.317.712,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(201.414.412,00)	0
Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	(565.308.089,12)	(540.125.269,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(373.782.700,02)	(368.810.627,74)
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	0	(4.774.100,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(3.600.000,00)	(3.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	0	(9.028.266,67)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(78.916.696,64)	(74.532.435,71)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(9.335.512,08)	(8.752.042,57)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(56.338.297,05)	(50.793.702,97)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	(26.581.200,00)	(20.434.093,34)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	(9.592.533,33)	0
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(7.161.150,00)	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(47.313.200,00)	(35.484.900,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(47.313.200,00)	0
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0	(35.484.900,00)
JUMLAH ASET	2.626.290.184,11	2.745.711.220,31

URAIAN	NILAI PERTANGGAL	
	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	2	3
KEWAJIBAN	15.733.091,00	9.673.721,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.733.091,00	9.673.721,00
Utang Belanja	15.733.091,00	9.673.721,00
Utang Belanja Pegawai	1.402.571,00	971.697,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	1.305.100,00	862.500,00
Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	31.402,00	63.798,00
Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	85,00	69,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53.460,00	37.053,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.130,00	2.070,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	9.394,00	6.207,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	14.330.520,00	8.702.024,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	6.087.250,00	0
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	8.243.270,00	8.702.024,00
JUMLAH KEWAJIBAN	15.733.091,00	9.673.721,00
EKUITAS	2.610.557.093,11	2.736.037.499,31
EKUITAS	2.610.557.093,11	2.736.037.499,31
Ekuitas	(3.516.137.251,59)	2.736.037.499,31
Ekuitas	2.736.037.499,31	2.736.037.499,31
Ekuitas	2.736.037.499,31	2.736.037.499,31
Surplus/Defisit-LO	(6.252.174.750,90)	0
Surplus/Defisit-LO	(6.252.174.750,90)	0
RK PPKD	6.126.694.344,70	0
RK PPKD	6.126.694.344,70	0
JUMLAH EKUITAS DANA	2.610.557.093,11	2.736.037.499,31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.626.290.184,11	2.745.711.220,31



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL (LO)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH - LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
Retribusi Daerah-LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
Retribusi Jasa Umum-LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
Jumlah Retribusi Daerah-LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
JUMLAH PENDAPATAN	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
BEBAN DAERAH	6.588.911.150,90	6.179.187.777,00	387.544.073,90	5,88
BEBAN OPERASI	6.087.827.830,78	6.179.187.777,00	(113.539.246,22)	(1,87)
Beban Pegawai	2.092.464.293,70	2.096.010.859,00	(3.546.565,30)	(0,17)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.262.642.362,00	1.230.083.539,00	32.558.823,00	2,58
Beban Gaji Pokok ASN	892.968.200,00	869.566.000,00	23.402.200,00	2,62
Beban Gaji Pokok PNS	892.968.200,00	869.566.000,00	23.402.200,00	2,62
Beban Tunjangan Keluarga ASN	94.154.036,00	89.806.116,00	4.347.920,00	4,62
Beban Tunjangan Keluarga PNS	94.154.036,00	89.806.116,00	4.347.920,00	4,62
Beban Tunjangan Jabatan ASN	126.350.000,00	126.350.000,00	0	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	126.350.000,00	126.350.000,00	0	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.965.000,00	17.920.000,00	45.000,00	0,25
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.965.000,00	17.920.000,00	45.000,00	0,25
Beban Tunjangan Beras ASN	55.546.140,00	54.315.000,00	1.231.140,00	2,22
Beban Tunjangan Beras PNS	55.546.140,00	54.315.000,00	1.231.140,00	2,22
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.549.116,00	1.928.980,00	1.620.136,00	45,65
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.549.116,00	1.928.980,00	1.620.136,00	45,65
Beban Pembulatan Gaji ASN	11.824,00	11.537,00	287,00	2,43
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.824,00	11.537,00	287,00	2,43
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	64.742.655,00	63.017.686,00	1.724.969,00	2,66
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	64.742.655,00	63.017.686,00	1.724.969,00	2,66
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.838.828,00	1.792.034,00	46.794,00	2,54
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.838.828,00	1.792.034,00	46.794,00	2,54
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.516.563,00	5.376.186,00	140.377,00	2,54

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.516.563,00	5.376.186,00	140.377,00	2,54
Beban Tambahan Penghasilan ASN	659.591.931,70	657.277.320,00	2.314.611,70	0,35
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	252.852.165,70	657.277.320,00	(404.425.154,30)	(159,95)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	252.852.165,70	657.277.320,00	(404.425.154,30)	(159,95)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	406.739.766,00	0	406.739.766,00	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	406.739.766,00	0	406.739.766,00	100
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	170.230.000,00	208.650.000,00	(38.420.000,00)	(22,57)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	15.500.000,00	14.250.000,00	1.250.000,00	8,06
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	15.500.000,00	14.250.000,00	1.250.000,00	8,06
Beban Honorarium	150.980.000,00	179.400.000,00	(28.420.000,00)	(18,82)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	150.980.000,00	179.400.000,00	(28.420.000,00)	(18,82)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	3.750.000,00	15.000.000,00	(11.250.000,00)	(300)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.750.000,00	15.000.000,00	(11.250.000,00)	(300)
Beban Barang dan Jasa	3.973.184.237,08	4.083.176.918,00	(109.992.680,92)	(2,77)
Beban Barang	464.733.161,00	341.515.600,00	123.217.561,00	26,51
Beban Barang Pakai Habis	464.733.161,00	341.515.600,00	123.217.561,00	26,51
Beban Bahan-Bahan Kimia	0	1.200.000,00	(1.200.000,00)	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.052.000,00	12.842.900,00	12.209.100,00	48,74
Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.100.000,00	0	3.100.000,00	100
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49.944.000,00	0	49.944.000,00	100
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.954.388,00	43.278.650,00	(8.324.262,00)	(23,81)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0	14.518.400,00	(14.518.400,00)	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	288.301.673,00	107.663.900,00	180.637.773,00	62,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.120.000,00	2.000.000,00	120.000,00	5,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.445.000,00	17.500.000,00	(11.055.000,00)	(171,53)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	15.192.000,00	28.640.050,00	(13.448.050,00)	(88,52)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.460.600,00	3.574.200,00	886.400,00	19,87
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.360.000,00	51.617.500,00	(49.257.500,00)	(2.087)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.303.500,00	19.260.000,00	(8.956.500,00)	(86,93)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	10.020.000,00	(10.020.000,00)	0
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.500.000,00	29.400.000,00	(6.900.000,00)	(30,67)
Beban Jasa	2.807.832.991,08	3.160.506.480,00	(352.673.488,92)	(12,56)
Beban Jasa Kantor	2.692.872.991,08	3.103.746.480,00	(410.873.488,92)	(15,26)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.650.000,00	0	2.650.000,00	100
Beban Jasa Tenaga Administrasi	203.350.000,00	194.700.000,00	8.650.000,00	4,25

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	28.600.000,00	26.400.000,00	2.200.000,00	7,69
Beban Jasa Tenaga Keamanan	33.600.000,00	26.400.000,00	7.200.000,00	21,43
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	291.500.000,00	286.500.000,00	5.000.000,00	1,72
Beban Jasa Iklan/Reklame, film dan Pemetretan	854.100.900,00	915.600.000,00	(61.499.100,00)	(7,20)
Beban Tagihan Telepon	72.957.600,00	0	72.957.600,00	100
Beban Tagihan Listrik	105.160.795,00	97.100.005,00	8.060.790,00	7,67
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	495.600.000,00	(492.000.000,00)	(13.667)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.091.787.293,00	1.054.200.000,00	37.587.293,00	3,44
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.566.403,08	7.246.475,00	(1.680.071,92)	(30,18)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	104.960.000,00	36.760.000,00	68.200.000,00	64,98
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.780.000,00	29.560.000,00	(14.780.000,00)	(100)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	86.580.000,00	0	86.580.000,00	100
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.600.000,00	7.200.000,00	(3.600.000,00)	(100)
Beban Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(100)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(100)
Beban Pemeliharaan	229.477.440,00	191.786.900,00	37.690.540,00	16,42
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137.190.290,00	127.936.300,00	9.253.990,00	6,75
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.123.290	0	7.123.290,00	100
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	73.370.000	73.370.000	0	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda dua	19.050.000	19.050.000	0	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	6.724.300	(6.724.300,00)	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	500.000	500.000	0	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.060.000	7.320.000	(1.260.000,00)	(20,79)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	500.000	(500.000,00)	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio,Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	8.000.000	0	8.000.000,00	100
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000	0	20.000.000,00	100
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.087.000	19.092.000	(16.005.000,00)	(518,46)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0	1.380.000	(1.380.000,00)	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.770.500	44.351.000	5.419.500,00	10,89
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.866.000	14.415.000	(4.549.000,00)	(46,11)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	29.936.000	(29.936.000,00)	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	39.904.500	0	39.904.500,00	100
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.516.650,00	19.499.600,00	23.017.050,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalansi-Instalansi Lain-Instalansi Lain	0	1.500.000	(1.500.000,00)	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telpo- Jaring Telpo di atas Tanah	0	17.999.600	(17.999.600,00)	0,00

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya	42.516.650,00	0	42.516.650,00	100
Beban Perjalanan Dinas	471.140.645,00	389.367.938,00	81.772.707,00	17,36
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	471.140.645,00	389.367.938,00	81.772.707,00	17,36
Beban Perjalanan Dinas Biasa	368.554.175,00	273.612.378,00	94.941.797,00	25,76
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.586.470,00	115.755.560,00	(13.169.090,00)	(12,84)
Beban Penyisihan Piutang	22.179.300,00	0,00	22.179.300,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	22.179.300,00	0,00	22.179.300,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	22.179.300,00	0,00	22.179.300,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	22.179.300,00	0,00	22.179.300,00	100,00
JUMLAH BEBAN	6.087.827.830,78	6.179.187.777,00	(91.359.946,22)	(1,50)
<u>Beban Penyusutan dan Amortisasi</u>	501.083.320,12	0	501.083.320,12	100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	464.072.200,00	0	464.072.200,00	100
Beban Penyusutan Alat Besar	5.275.000,00	0	5.275.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Bantu	5.275.000,00	0	5.275.000,00	100
Beban Penyusutan Electric Generating Set	4.500.000,00	0	4.500.000,00	100
Beban Penyusutan Pompa	775.000,00	0	775.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Angkutan	17.711.000,00	0	17.711.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.711.000,00	0	17.711.000,00	100
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.711.000,00	0	17.711.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	86.744.700,00	0	86.744.700,00	100
Beban Penyusutan Alat Kantor	5.197.500,00	0	5.197.500,00	100
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	5.197.500,00	0	5.197.500,00	100
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	76.422.200,00	0	76.422.200,00	100
Beban Penyusutan Mebel	4.000.000,00	0	4.000.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Pendingin	1.250.000,00	0	1.250.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Dapur	750.000,00	0	750.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.422.200,00	0	70.422.200,00	100
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.125.000,00	0	5.125.000,00	100
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	1.000.000,00	0	1.000.000,00	100
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	4.125.000,00	0	4.125.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	179.838.300,00	0	179.838.300,00	100
Beban Penyusutan Alat Studio	71.441.000,00	0	71.441.000,00	100
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	71.441.000,00	0	71.441.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	94.925.000,00	0	94.925.000,00	100
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	94.925.000,00	0	94.925.000,00	100

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	13.472.300,00	0	13.472.300,00	100
Beban Penyusutan Switcher Antena	13.472.300,00	0	13.472.300,00	100
Beban Penyusutan Komputer	174.503.200,00	0	174.503.200,00	100
Beban Penyusutan Komputer Unit	85.259.800,00	0	85.259.800,00	100
Beban Penyusutan Personal Computer	85.259.800,00	0	85.259.800,00	100
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	89.243.400,00	0	89.243.400,00	100
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	8.272.800,00	0	8.272.800,00	100
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	76.973.600,00	0	76.973.600,00	100
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	3.997.000,00	0	3.997.000,00	100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.182.820,12	0	25.182.820,12	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.084.396,79	0	16.084.396,79	100
Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.500.927,28	0	15.500.927,28	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	4.972.072,27	0	4.972.072,27	100
Beban Penyusutan Bangunan Gudang	600.000,00	0	600.000,00	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	4.384.260,93	0	4.384.260,93	100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.544.594,08	0	5.544.594,08	100
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	583.469,51	0	583.469,51	100
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	583.469,51	0	583.469,51	100
Beban Penyusutan Bangunan Menara	6.711.373,33	0	6.711.373,33	100
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	6.711.373,33	0	6.711.373,33	100
Beban Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi	6.147.106,67	0	6.147.106,67	100
Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Lainnya	564.266,66	0	564.266,66	100
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.387.050,00	0	2.387.050,00	100
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	2.387.050,00	0	2.387.050,00	100
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	2.387.050,00	0	2.387.050,00	100
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.828.300,00	0	11.828.300,00	100
Beban Penyusutan Instalasi	11.828.300,00	0	11.828.300,00	100
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	11.828.300,00	0	11.828.300,00	100
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	11.828.300,00	0	11.828.300,00	100
JUMLAH BEBAN	501.083.320,12	0	501.083.320,12	100
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(6.252.174.750,90)	(5.859.754.377,00)	(392.420.373,90)	6,28



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	2.736.037.499,31	2.736.037.499,31
RK PPKD	6.126.694.344,70	0
Surplus/ Defisit - LO	(6.252.174.750,90)	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0	0
JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.610.557.093,11	2.736.037.499,31

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya tahun anggaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- 
- 
- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target ;
 - b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan ;
 - c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya ;
 - d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas ;
 - e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 50);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 19);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara garis besar sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.

Bab V Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan

5.1. Rincian dari Penjelasan dari masing-masing pos – pos pelaporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan – LRA

5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3. Penjelasan Pos-Pos Perubahan Ekuitas

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas

5.4.4. Kewajiban dan Ekuitas

Bab VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan seperti tingkat pendapatan nasional, jumlah uang yang beredar, kesempatan kerja, laju dari inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional, investasi nasional dan lain-lain. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat

dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dititik beratkan pada :

1. Kebijakan pendapatan keuangan daerah yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi) dan diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi asset daerah, dan peningkatan dan perimbangan dan bagi hasil.
2. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dan program strategis yang memiliki dampak (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun untuk menilai tingkat efektivitas dan efesiensi hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja serta meningkatkan kinerja organisasi.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023 untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang menjadi acuan untuk tahun berikutnya, dapat dilihat dari:

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

Efektivitas evaluasi realisasi program dan kegiatan atas target kinerja hasil yang direncanakan, perlu dilakukan klasifikasi menurut urusan pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika berada pada urusan wajib non pelayanan dasar. Capaian Kinerja Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 sebesar Rp.6.557.124.570,00 terealisasi sebesar Rp.6.437.437.983,00 atau sebesar 98,17%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses penganggaran APBD harus berdasarkan target kinerja yang terukur atau yang lebih dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dalam bentuk alokasi anggaran yang akan diukur capaian kinerjanya pada akhir Tahun Anggaran.

Pelaksanaan APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana rincian pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel. 3.1
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 dan 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK/TURUN
1	BELANJA OPERASI	6.194.558.486,00	6.059.637.177,70	97,82	6.180.440.815,00	(120.803.637,30)
2	BELANJA MODAL	362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00	(656.818.000,00)
JUMLAH		6.557.124.570,00	6.419.072.177,70	97,89	7.196.693.815,00	(777.621.637,30)

Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar **Rp.333.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.292.377.800,00** atau **87,80 %**. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar **Rp.319.433.400,00** terjadi penurunan sebesar **Rp.27.055.600,00**.

Pagu Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar **Rp.6.557.124.570,00** terealisasi sebesar **Rp. 6.419.072.177,70** atau **97,89%** dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar **Rp. 7.196.693.815,00** terjadi penurunan sebesar **Rp. 777.621.637,30**.

Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Adapun penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Rincian realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

NO	BELANJA OPERASI	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK/TURUN
1	Belanja Pegawai	2.159.881.179,00	2.092.033.419,70	96,86	2.097.338.227,00	(5.304.807,30)
2	Belanja Barang dan Jasa	4.034.677.307,00	3.967.603.725,00	98,34	4.083.102.588,00	(115.498.863,00)
JUMLAH		6.194.558.486,00	6.059.637.144,70	97,82	6.180.440.815,00	(120.803.670,30)

a.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja langsung adalah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

a.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilainya manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud mencakup belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja kursus/pelatih, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

b. Belanja Modal

Rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK/TURUN
1	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00	(656.818.000,00)
JUMLAH		362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00	(656.818.000,00)

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan yakni Keterlambatan Penyetoran dari Pihak Ketiga ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari PT. Inti Bangun Sejahtera (Rp.10.381.800,00) dan PT. Solusi Tunas Pratama (Rp.33.976.800,00) yang dibayarkan pada awal tahun 2024 sehingga menjadi piutang pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan untuk pencapaian target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mengalami kendala yang berarti terbukti dengan capaian kinerja APBD sebesar Rp. 6.419.072.177,70 atau tercapai sebesar 97,89%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau suatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi dalam Laporan Keuangan ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Struktur dan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Perda tersebut di atas, pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD adalah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis Akuntansi, 2) Prinsip Nilai Historis, 3) Prinsip Realisasi, 4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, 5) Prinsip Periodisasi, 6) Prinsip Konsistensi, 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap, 8) Prinsip Penyajian Wajar. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Kebijakan akuntansi pokok yang

diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau diterima SKPD atau entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. (Sisa perhitungan anggaran selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran).

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak ditransfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering mengalami kurang bayar atau lebih bayar, untuk hal tersebut diperlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan, masih diperlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki hak atas pendapatan;
- b. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen;
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, dan IMB langsung ditetapkan di depan.

2. Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban dan terjadinya pengeluaran kas.

Khusus Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali Belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja dibukukan sebagai *pengurangan Belanja* pada periode yang sama. Apabila diterima pada tahun berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibukukan pada *Pendapatan Lain-Lain*.

3. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

4. Pembiayaan

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 52, Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 56 Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5. Aset

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah, Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Pelaporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Agar informasi yang disajikan dapat dipahami perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan laporan realisasi anggaran dan neraca.

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pemda merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan ini akan disajikan sesuai dengan struktur APBD tahun 2023.

5.1.1. Pendapatan – (LRA)

Jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 berasal dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.333.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023. Adapun Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 sebesar Rp. 292.377.800,00 atau 87,80% dari anggaran, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022 sebesar Rp.319.433.400,00 terjadi penurunan sebesar Rp.27.055.600,00. dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.1 dan 5.2 berikut.

Tabel. 5.1
Rincian Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	333.000.000	292.377.800	319.433.400

Tabel. 5.2
Rincian Realisasi Pendapatan TA 2023

NO	RETRIBUSI DAERAH	TARGET ANGGARAN	REALISASI
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel)	126.783.800	126.783.800
2	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Petrochina International Jabung Ltd	10.381.800	10.381.800
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia	10.381.800	10.381.800
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Telkomsel	20.134.400	20.134.400
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. EPID Menara Assetco	9.237.800	9.237.800
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Centratama Menara Indonesia	9.752.600	9.752.600
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi (PROTELINDO)	36.808.200	36.808.200
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Tower Bersama Group (TBG)	52.223.600	52.223.600
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Solusindo Kreasi Pratama (TBG)	13.842.400	13.842.400
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Solusi Menara Indonesia (TBG)	2.831.400	2.831.400
11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Inti Bangun Sejahtera	10.381.800	0
12	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi PT. Solusi Tunas Pratama	33.976.800	0

Kegagalan pencapaian target retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikarenakan Keterlambatan Penyetoran dari Pihak Ketiga (PT. Inti Bangun sejahtera dan PT. Solusi Tunas Pratama) ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibayarkan pada awal tahun 2024 sehingga target pendapatan tidak dapat tercapai. Ada pun upaya yang telah dilakukan Dinas komunikasi dan Informatika dalam mengatasi permasalahan pencapaian target retribusi pengendalian Menara telekomunikasi yakni melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang mengalami keterlambatan dalam penyetoran retribusi.

5.1.2. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

BELANJA	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022
	6.557.124.570,00	6.419.072.144,70	7.196.693.815,00

Realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2023 sebesar Rp. 6.419.072.144,70 dari anggaran sebesar Rp.6.557.124.570,00 atau sebesar 97,89%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp.7.196.693.815,00 turun sebesar Rp. 777.621.637,30. Rincian Realisasi Belanja TA 2023 diuraikan dalam Laporan Realisasi dan Pendapatan dan Belanja. Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2023 berdasarkan kelompok belanja sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.3 berikut:

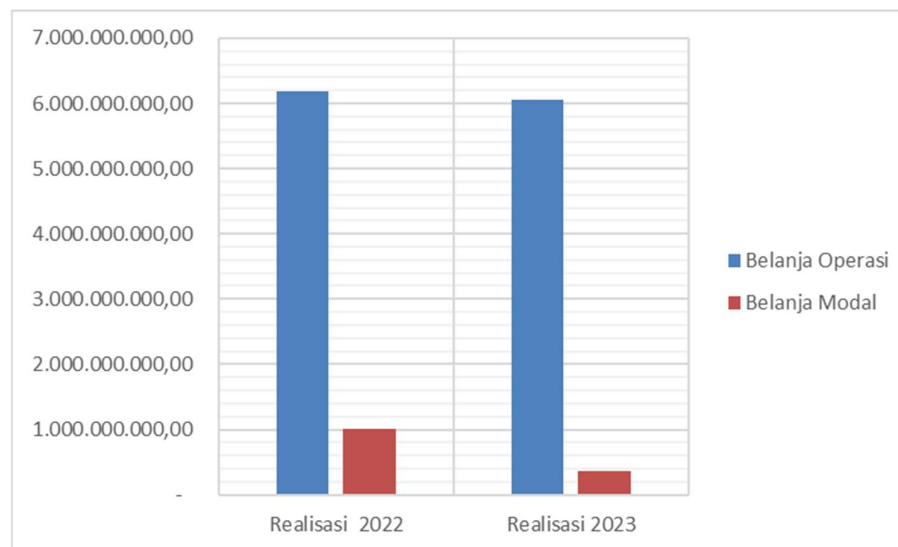
Tabel. 5.3

Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Kelompok Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK/TURUN
1	BELANJA OPERASI	6.194.558.486,00	6.059.637.177,70	97,82	6.180.440.815,00	(120.803.637,30)
2	BELANJA MODAL	362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00	(656.818.000,00)
JUMLAH		6.557.124.570,00	6.419.072.177,70	97,89	7.196.693.815,00	(777.621.637,30)

Grafik 5.1

Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah TA 2023 dan 2022



5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja Operasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp.6.059.637.144,70 dari anggaran sebesar Rp.6.194.558.486,00 atau sebesar 97,82%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp.6.180.440.815,00 turun sebesar Rp. 120.803.670,30. Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2023 diuraikan dalam tabel 5.4 berikut:

Tabel. 5.4

Realisasi Belanja Operasi Menurut Jenis Belanja TA 2023 dan 2022

NO	BELANJA OPERASI	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK/TURUN
1	Belanja Pegawai	2.159.881.179,00	2.092.033.419,70	96,86	2.097.338.227,00	(5.304.807,30)
2	Belanja Barang dan Jasa	4.034.677.307,00	3.967.603.725,00	98,34	4.083.102.588,00	(115.498.863,00)
JUMLAH		6.194.558.486,00	6.059.637.144,70	97,82	6.180.440.815,00	(120.803.670,30)

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 2.092.033.419,70 dari anggaran sebesar Rp.2.159.881.179,00 atau sebesar 96,86%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp.2.097.338.227,00 turun sebesar Rp. 5.304.807,30. Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2023 diuraikan dalam tabel 5.5 berikut:

Tabel. 5.5

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

NO	BELANJA PEKAWAI	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK/TURUN
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.264.351.499,00	1.262.211.488,00	99,83	1.231.410.907,00	30.800.581,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	688.149.680,00	659.591.931,70	95,85	657.277.320,00	2.314.611,70
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	207.380.000,00	170.230.000,00	82,09	208.650.000,00	(38.420.000,00)
JUMLAH		2.159.881.179,00	2.092.033.419,70	96,86	2.097.338.227,00	(5.304.807,30)

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp.4.034.677.307,00 dari anggaran sebesar Rp.3.967.603.725,00 atau sebesar 98,34%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp.4.083.102.588,00 naik sebesar Rp.115.498.863,00. Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2023 diuraikan dalam tabel 5.6 berikut:

Tabel. 5.6
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

NO	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK/TURUN
1	Belanja Barang Pakai Habis	474.247.307,00	464.884.361,00	98,03	341.371.200,00	123.513.161,00
2	Belanja Jasa Kontr	2.711.010.000,00	2.687.141.279,00	99,12	3.103.816.550,00	(416.675.271,00)
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	105.980.000,00	104.960.000,00	99,04	36.760.000,00	68.200.000,00
4	Belanja Kursus/Pelatih, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	20.000.000,00	(10.000.000,00)
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.700.000,00	137.190.290,00	97,51	127.936.300,00	9.253.990,00
6	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	52.240.000	49.770.500	95,27	44.351.000	5.419.500,00
7	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000	42.516.650	94,48	19.499.600	23.017.050,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	490.500.000,00	471.140.645,00	96,05	389.367.938,00	81.772.707,00
JUMLAH		4.034.677.307,00	3.967.603.725,00	98,34	4.083.102.588,00	(115.498.863,00)

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode aku. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp.359.435.000,00 dari anggaran sebesar Rp.362.566.084,00 atau sebesar 99,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp.1.016.253.000,00 turun sebesar Rp.656.818.000,00. Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2023 diuraikan dalam tabel 5.7 berikut:

Tabel. 5.7
Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

NO	BELANJA MODAL	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	NAIK/TURUN
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00	(656.818.000,00)
JUMLAH		362.566.084,00	359.435.000,00	99,14	1.016.253.000,00	(656.818.000,00)

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.336.736.400,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar Rp.319.433.400,00 naik sebesar Rp.17.303.000,00. Pendapatan-LO Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.8 berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
PENDAPATAN DAERAH - LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	336.736.400,00	319.433.400,00	17.303.000,00	5,14

5.2.2. Beban

Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.6.588.911.150,90 jika dibandingkan dengan Beban Tahun 2022 sebesar Rp.6.179.187.777,00 naik sebesar Rp.409.723.373,90.

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp.2.092.464.293,70 jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp.2.096.010.859,00 turun sebesar Rp.3.546.565,30 atau 0,17%. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp.3.973.184.237,08 jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp.4.083.176.918,00 turun sebesar Rp109.992.680,92 atau 2,77%. Tahun 2023 terdapat Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 22.179.300,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp.501.083.320,12 naik 100% atau sebesar Rp.501.083.320,12. Beban Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9
Realisasi Beban Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
BEBAN	6.588.911.150,90	6.179.187.777,00	409.723.373,90	5,90
Beban Pegawai	2.092.464.293,70	2.096.010.859,00	(3.546.565,30)	(0,17)
Beban Barang dan Jasa	3.973.184.237,08	4.083.176.918,00	(109.992.680,92)	(2,77)
Beban Penyisihan Piutang	22.179.300,00	0	22.179.300,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	464.072.200,00	0	464.072.200,00	100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.182.820,12	0	25.182.820,12	100
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.828.300,00	0	11.828.300,00	100

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 per 31 Desember sebesar Rp.0,00 .

5.2.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 per 31 Desember sebesar Rp.0,00 .

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi laporan perubahan ekuitas adalah sebagai penghubung antara laporan operasional dengan neraca yang

menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Posisi ekuitas pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.610.557.093,11 dengan uraian sebagaimana pada tabel 5.10 berikut

Tabel 5.10
Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	2.736.037.499,31	2.736.037.499,31
RK PPKD	6.126.694.344,70	0
Surplus/ Defisit - LO	(6.252.174.750,90)	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0	0
JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.610.557.093,11	2.736.037.499,31

5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan Pos-Pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan Pos-Pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1. Aset

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.648.247.691,11 jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.745.711.220,31 turun sebesar Rp. 97.463.529,20 Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.11 berikut.

Tabel 5.11
Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
1	Aset Lancar	26.661.238,08	4.433.954,16	22.227.283,92
2	Investasi Jangka Panjang	0	0	-
3	Aset Tetap	2.599.628.946,03	2.741.277.266,15	(141.648.320,12)
4	Aset Lainnya	0	0	-
JUMLAH		2.626.290.184,11	2.745.711.220,31	(119.421.036,20)

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.11 di atas terdapat penurunan Aset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2023 sebesar Rp. 119.421.036,20 Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh :

Peningkatan nilai Piutang akibat naiknya Jumlah piutang TA 2023 yang belum tertagih. Khususnya untuk Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Penjelasan Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas serta Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 26.661.238,08. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.433.954,16 naik sebesar Rp.22.227.283,92. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.12 berikut.

Tabel 5.11
Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
1	Kas dan Setara Kas	0	0	-
2	Piutang Pendapatan	44.358.600,00	0	44.358.600,00
3	Piutang Lainnya	0	0	-
4	Penyisihan Piutang	(22.179.300)	0	(22.179.300,00)
5	Beban dibayar dimuka	3.497.938,08	3.601.154,16	(103.216,08)
6	Persediaan	984.000,00	832.800,00	151.200,00
JUMLAH		26.661.238,08	4.433.954,16	22.227.283,92

1) Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa Uang Persediaan (UP) Perangkat Daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 Hal ini dikarenakan tertibnya pengelolaan kas akhir Tahun pada Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga per 31 Desember 2023 tidak lagi terdapat sisa kas di Rekening Bank maupun kas tunai di Bendahara pengeluaran OPD.

2) Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Nilai Piutang Pendapatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan tetapi belum dibayar/disetor ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023. Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.44.358.600,00 jika dibandingkan dengan Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 naik sebesar Rp.44.358.600,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.12 berikut.

Tabel 5.12
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	44.358.600,00	0	44.358.600,00
JUMLAH		44.358.600,00	-	44.358.600,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.358.600,00 pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan ketetapan penerimaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

3) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 per 31 Desember sebesar Rp.0,00 .

4) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 per 31 Desember sebesar Rp.22.179.300,00 .

5) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran Belanja TA 2023 yang mempunyai manfaat melebihi periode pelaporan seperti Asuransi, Sewa dan Pajak Kendaraan Bermotor maupun Pajak Frekuensi Radio . Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.497.938,08 jika dibandingkan dengan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.601.154,16 turun sebesar Rp103.216,08. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13
Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
1	Pajak Kendaraan Dinas Bermotor	1.811.833,33	1.915.083,33	(103.250,00)
2	Pajak Spektrum Frekuensi Radio (ISR)	1.686.104,75	1.686.070,83	33,92
JUMLAH		3.497.938,08	3.601.154,16	(103.216,08)

6) Persediaan

Persediaan merupakan pengadaan barang habis pakai, Belanja Barang Jasa lainnya yang masih tersisa sampai dengan 31 Desember 2023. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.984.000,00 jika dibandingkan dengan Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.832.800,00 terjadi kenaikan sebesar Rp151.200,00. Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.14 berikut.

Tabel 5.14
Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
1	Alat Tulis Kantor	620.000,00	734.200,00	(114.200,00)
2	Bahan Cetak	303.000,00	70.500,00	232.500,00
3	Perabot Kantor	61.000,00	28.100,00	32.900,00
JUMLAH		984.000,00	832.800,00	151.200,00

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 per 31 Desember sebesar Rp.0,00 .

5.4.1.3. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.599.628.946,03, jika dibandingkan dengan nilai Aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.741.277.266,15 turun sebesar Rp.141.648.320,12. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2021 dalam rangka penyusutan barang milik daerah berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka penyusutan dilaksanakan setelah satu tahun perolehan aset. Saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.15 berikut.

Tabel 5.15
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
1	Tanah	0	0	-
2	Peralatan dan Mesin	5.463.350.712,00	5.103.915.712,00	359.435.000,00
3	Gedung dan Bangunan	1.503.383.935,15	1.503.383.935,15	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.283.000,00	118.283.000,00	-
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	-
6	Akumulasi Penyusutan	(4.485.388.701,12)	(3.984.305.381,00)	(501.083.320,12)
JUMLAH		2.599.628.946,03	2.741.277.266,15	(141.648.320,12)

1. Tanah

Dinas Komunikasi dan Informatika sampai pada saat ini tidak memiliki Aset Tanah.

2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.463.350.712,00 jika dibandingkan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.103.915.712,00 naik sebesar Rp.359.435.000,00. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.16 berikut.

Tabel 5.16
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Alat Besar	199.788.000,00	167.100.000,00
2	Alat Angkutan	646.117.400,00	628.717.400,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.697.000,00	4.697.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.246.682.100,00	1.271.351.400,00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.122.813.000,00	1.483.400.000,00
6	Komputer	2.243.253.212,00	1.548.649.912,00
JUMLAH		5.463.350.712,00	5.103.915.712,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2023	Rp 5.103.915.712
Penambahan Tahun 2023	Rp 359.435.000
Pengurangan Tahun 2023	Rp -
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp 5.463.350.712

Adapun Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

- Terdapat Mutasi Tambah pada Alat Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 20.000.000,00.
- Terdapat Mutasi Tambah pada Alat Kantor Lainnya yakni Belanja CCTV sebesar Rp. 64.235.000,00,
- Terdapat Mutasi Tambah pada Rekening Alat Rumah Tangga sebesar Rp.4.000.000,00 yang terdiri dari Belanja Mebel yakni Kursi Lipat Outdoor sebesar Rp.2.500.000,00 dan Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) yakni Dispenser Rp.1.500.000,00
- Mutasi Tambah pada Rekening Alat Studio sebesar Rp.50.132.384,00 yang terdiri dari Belanja Peralatan Studio Audio (Sound System) sebesar Rp. 21.439.884,00 dan Belanja Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp. 28.692.500,00.

- Mutasi Tambah pada Belanja Modal Personal Computer Rp.193.698.700,00 dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 30.500.000,00

Setelah melaksanakan proses verifikasi dan rekonsiliasi antara pengurus barang Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Keuangan Daerah, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap peralatan dan mesin per 31 desember 2023 sebesar Rp.5.463.350.712,00

3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.503.383.935,15 jika dibandingkan dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.503.383.935,15 masih tetap sama. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.17 berikut.

Tabel 5.17
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Gedung dan Bangunan	1.503.383.935,15	1.503.383.935,15
JUMLAH		1.503.383.935,15	1.503.383.935,15

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2023	Rp	1.503.383.935
Penambahan Tahun 2023	Rp	-
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	1.503.383.935

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tidak ada penambahan atau pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Setelah melalui proses verifikasi dan rekonsiliasi antara pengurus barang Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Keuangan Daerah, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan per 31 desember 2023 sebesar Rp.1.503.383.935,00 sesuai dengan dokumen lampiran berita acara rekonsiliasi aset tetap Tahun 2023.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 118.283.000,00 jika dibandingkan dengan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 118.283.000,00 masih

tetap sama. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.18 berikut.

Tabel 5.18
Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.283.000,00	118.283.000,00
JUMLAH		118.283.000,00	118.283.000,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari 2023	Rp	118.283.000
Penambahan Tahun 2023	Rp	-
Pengurangan Tahun 2023	Rp	-
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Rp	118.283.000

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tidak ada penambahan atau pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. Setelah melalui proses verifikasi dan rekonsiliasi antara pengurus barang Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Keuangan Daerah, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 desember 2023 sebesar Rp.118.283.000,00 sesuai dengan dokumen lampiran berita acara rekonsiliasi aset tetap Tahun 2023.

5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023 tidak terdapat Aset Tetap Lainnya.

6. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.485.388.701,12, dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.984.305.381,00 naik sebesar Rp.501.083.320,12. Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari masa manfaat ekonomis tiap kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.19 berikut.

Tabel 5.19
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
1	Peralatan dan Mesin	(3.872.767.412,00)	(3.408.695.212,00)	(464.072.200,00)
2	Bangunan dan Gedung	(565.308.089,12)	(540.125.269,00)	(25.182.820,12)
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(47.313.200,00)	(35.484.900,00)	(11.828.300,00)
JUMLAH		(4.485.388.701,12)	(3.984.305.381,00)	(501.083.320,12)

5.4.1.1. Aset Lainnya

Aset Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 per 31 Desember sebesar Rp.0,00 .

5.4.2. Kewajiban

Kewajiban terbagi atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek diantaranya meliputi: Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Belanja, Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, dan utang jangka pendek lainnya. Sedangkan Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, yang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023 memiliki Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas Tagihan Listrik, Telepon dan Utang Gaji PNS.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp.15.733.091,00 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.673.721,00 naik sebesar Rp.6.059.370,00. Kewajiban Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.20 berikut.

Tabel 5.19
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun
1	Utang Belanja Gaji Pegawai	1.402.571,00	971.697,00	430.874,00
2	Utang Belanja Tagihan Telepon	6.087.250,00	0	6.087.250,00
3	Utang Belanja Tagihan Listrik	8.243.270,00	8.702.024,00	(458.754,00)
JUMLAH		15.733.091,00	9.673.721,00	6.059.370,00



5.4.3. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.610.557.093,11 jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.736.037.499,31 turun sebesar Rp. 125.480.406,20.

BAB VI

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2023 yang mencakup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan Laporan Keuangan termasuk Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika ini struktur penganggarannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna. Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk menyempurnakan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Berbasis Akrua untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak,

2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur


HERMAN TONI, S.E., M.E
NIP. 19780420 200212 1 005